

REORIENTASI PENDIDIKAN ISLAM UNTUK HARMONISASI SOSIAL; *HIDDEN CURRICULUM* SEBAGAI SEBUAH TAWARAN

Cik Naimah & Ulil Hidayah
STAI Muhammadiyah Probolinggo

Abstract: *Islamic education as a source of value for human life has been challenged and its role has been questioned when facing conflict issues in the name of differences. In a disharmonic social interaction pattern, school is expected to perform continuous evaluation through curriculum development. PAI curriculum has been strongly emphasized its evaluation so far merely on cognitive and psychomotoric aspects, as shown by many evaluation indicators putting forward knowledge and skill, while putting affective aspects of basic competences on peripheral area so that they are not systematically evaluated. In this dilemmatic situation, it is necessary to rethink Islamic education role to exert its social responsibility through the determined curriculum. This study attempts to shed a light that utilizing hidden curriculum can be a solution to resolve social conflicts. Through this hidden curriculum, schools are able to develop and set policy strategies appropriate with the school capability and the needs of society, like creating tolerant culture or promoting equal rights and duties. Besides, through this hidden curriculum, teachers have more space to deliver religious lessons participatorically so that their pupils can grasp philosophically, not symbolically as a mental capital to respond future challenges of difference phenomena.*

Keywords: *Islamic Education, Social harmony, hidden curriculum*

PENDAHULUAN

Potret bangsa akhir-akhir ini banyak dinodai dengan konflik yang bersinggungan dengan isu-isu perbedaan paham keagamaan, perbedaan kelas sosial, perbedaan golongan dan berbagai perbedaan yang semakin memecah belah Negara kesatuan. Ketegangan dan kerusuhan yang bernuansa agama di beberapa wilayah Indonesia terus berlanjut dengan berbagai aksi demonstrasi dan pemboikotan di berbagai tempat. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara identitas agama (*das sollent*). Padahal secara historis bangsa Indonesia telah memiliki modal nasionalitas yang amat berharga, seperti kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keutuhan wilayah Negara, bahasa kesatuan, konstitusi dan falsafah Negara, sistem pemerintah yang meliputi seluruh tanah air, jajaran militer sebagai tulang punggung keterlibatan dan keamanan sosial.

Mengamati fenomena disharmonis sosial yang tidak pernah selesai itu, peranan tokoh agama maupun akademisi kurang mendapat porsi akibat paham pro dan kontra sudah mengakar pada masing-masing golongan. Pendidikan yang diartikan sebagai *agent*

of change sudah tidak nampak lagi fungsinya, justru gesekan-gesakan sosial yang terjadi adalah prodak dari pendidikan masa kini. Kalau sudah menyatakan pendidikan berarti didalamnya ada kurikulum yang menjadi ruh pendidikan tersebut. Lembaga pendidikan sebagai wadah yang mengajarkan nilai-nilai dan norma sebagai upaya mempersiapkan peserta didik menghadapi dan menjawab tantangan zaman rupanya mengalami perubahan sasaran. Seiring dengan era industrialisasi yang diwarnai hadirnya pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan besar rupanya pendidikan kita menyiapkan peserta didik yang siap terjun bersaing ke tengah masyarakat industri.

Pendidikan nasional direformasikan untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat Indonesia yang bersatu dan demokratis atau masyarakat yang berdaya, yaitu setiap anggota masyarakat yang demokratis mempunyai keberdayaan untuk mandiri dan kesadaran akan hak dan kewajiban. Kemudian lebih dari itu pendidikan memiliki tugas untuk mampu memecahkan masalah (*cope-ability*) bukan sekedar kecakapan (*capability*) dalam kehidupan sosial ummat beragama.¹ Dalam kehidupan sehari-hari konsep “tetangga dekat” secara fisik telah digantikan oleh tetangga dekat yang non fisik, hal ini akibat arus pengaruh sosial, budaya, politik, ekonomi maupun keagamaan yang beragam. Semakin jauh suatu agama berkembang ke luar lingkungan, akan semakin beragam tradisi keagamaan yang berkembang dalam agama yang bersangkutan. Menurut Bambang Pranowo keragaman adakalanya masih dapat dihimpun dalam bingkai “perbedaan adalah rahmat”, tetapi tidak jarang pula keragaman tersebut menjurus pada konflik antar kelompok yang cenderung membawa laknat.²

Keragaman tradisi keagamaan selanjutnya menimbulkan keragaman pula dalam merespon perkembangan dan tantangan yang dihadapi. Adanya kelompok-kelompok tradisional dan modernis Islam dalam konteks Islam di Indonesia adalah contohnya. Pada gilirannya keragaman tersebut menimbulkan masyarakat yang kompleks dan menyebabkan terjadinya diferensiasi struktural dalam suatu agama. Berkembangnya jalan akses internet dan munculnya kolumnis ataupun pembawa acara keagamaan media-media informasi menunjukkan betapa panutan dalam kehidupan beragama tidak lagi merupakan monopoli dari para guru atau kyai konvensional.

Dengan semakin cepat dan beragamnya menu informasi yang menerpa masyarakat modern maka semakin beragam pulatanggapan, respon, referensi maupun interupsi dari masyarakat luas, termasuk para agamawan dalam memberikan makna terhadap peristiwa. Selain itu tingkat mobilitas sosial yang semakin meningkat dan tidak mengenal batas geografis telah menyebabkan masyarakat tidak mampu mempertahankan homogenitas kulturalnya. Kemajemukan kultural menjadikan konskuensi logis dari proses modernisasi yang harus dirangkul oleh dunia pendidikan.

Masyarakat Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai warga yang suka bergotong royong kini banyak yang berubah haluan menjadi manusia yang individualistik dan bergantung pada produk-produk industri. Paham manusia yang seperti ini mengarah pada positivism. dalam positivisme ini banyak aspek-aspek yang positive,

¹ Bambang Pranowo, “Reformasi Pendidikan Islam dalam Millenium III”, dalam Mudjia Rahardjo (ed). Quo Vadis Pendidikan Islam. (Malang: UIN Malang Perss), 30.

² Ibid, 31.

tetapi juga terdapat banyak kerugian-kerugian.³ Diantara kerugiannya adalah pada kenyataan dimana paham tersebut telah membuat orang yang sudah punya gelar profesor atau doktor seakan-akan telah mempunyai keterampilan yang luar biasa walaupun pada kenyataannya tidaklah demikian. Mereka dalam kenyataannya tidak mempunyai daya tahan menggeluti perubahan-perubahan yang besar.

Kembali menilik pada tugas dan peran pendidikan adalah selalu melakukan evaluasi melalui kurikulum yang dikembangkan. Kurikulum yang bertindak sebagai sebuah ruh pendidikan harus mampu menjawab tantangan global masyarakat dengan pendekatan-pendekatan yang sistematis dan holistik. Sasaran yang hendak dicapai dalam kurikulum pendidikan haruslah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sebab sekolah sebagai agent of change dituntut bukan sekedar berkembang dalam bidang intelektual atau bersaing dalam lingkungan internasional saja, melainkan lebih dari itu tantangan sosial yang bersifat local menuntut banyak pertanyaan untuk dijawab dan diselesaikan permasalahannya secara bersama-sama.

Kurikulum Pendidikan Islam

Pemerintah memiliki peran signifikan dalam penyusunan kurikulum sekolah, termasuk kurikulum pendidikan agama Islam. Sebagaimana kurikulum 2006 yang disusun berdasarkan kompetensi standar (Kurikulum Berbasis Kompetensi). Kompetensi-kompetensi standar nasional oleh otoritas pendidikan yang terpusat dari Kemendiknas dan Kemenag. Sementara pada Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pelajar oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Pada model KTSP ini sebenarnya sekolah lebih efektif untuk mengembangkan dan memberikan otonomi luas pada setiap satuan pendidikan dengan melibatkan peran masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar disekolah.⁴ Otonomi diberikan agar setiap satuan pendidikan dan sekolah memiliki keleluasaan dalam mengelola sumberdaya, sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat.

Pergeseran kebijakan kurikulum dari KTSP berpindah lagi pada Kurikulum 2013 yang lebih mengedepankan keterampilan peserta didik untuk mengeksplor kemampuan mereka sendiri. Konsep integrasi dari kurikulum 2013 memberikan ruang pemahaman yang lebih luas, khususnya pada mata pelajaran PAI di sekolah peserta didik dapat mengintegrasikan pemahaman keilmuan mereka dari sudut pandang PAI dengan mata pelajaran lainnya yang masih satu tema. Problema dikotomi keilmuan yang selama ini masih diperdebatkan dapat terjawab melalui kurikulum 2013 ini karena ilmu pengetahuan yang dipelajari tidak dikotak-kotakkan antara ilmu agama dan sains. Kemudian selanjutnya ada penekanan kuat dalam kurikulum 2013 ini, yaitu guru hanya bertindak sebagai fasilitator belajar dalam kelas dan kurang memiliki ruang gerak sebagai

³ Abdurrahman Wahid, *"Pendidikan di Indonesia; Antara Populisme dan Elitisme"*, dalam Mudjia Rahardjo (ed). *Quo Vadis Pendidikan Islam* (Malang: UIN Malang Perss), 1.

⁴ Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 21.

pusat panutan peserta didik, sehingga kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial kurang mendapat porsi perhatian untuk guru kepada peserta didiknya.

Brady dan Kennedy menjelaskan terdapat perbedaan pendapat tentang definisi kurikulum sekolah. Sebagian mengklaim bahwa suatu kurikulum merupakan muatan atau tujuan-tujuan dimana sekolah-sekolah menginginkan peserta didik untuk mencapainya. Sebagian lagi mendefinisikan kurikulum sebagai perangkat strategi instruksional yang direncanakan akan digunakan oleh guru, pendefinisian kurikulum tersebut disebabkan oleh kepentingan yang berbeda terhadap pendidikan sekolah.⁵

Sistem desentralisasi pendidikan sebenarnya telah membuka ruang gerak bagi sekolah untuk terus memberikan inovasi perbaikan dalam menentukan kurikulum di sekolah masing-masing. Dan dalam merencanakan kurikulum pihak sekolah perlu mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dimana pendidikan itu berlangsung. Kelly menyatakan bahwa “mengabaikan nilai yang sangat esensial dan berusaha menyusun skema bebas dalam perencanaan kurikulum sama halnya dengan melewatkan poin utama.”⁶

Raihani⁷ membagi lima proses yang paling berkaitan dalam model penyusunan kurikulum, yaitu analisis situasional, penentuan tujuan, desain program, implementasi, penilaian dan evaluasi. Analisis situasional dalam model ini mengindikasikan suatu pendekatan yang lebih komprehensif terhadap kurikulum daripada model-model tradisional yang hanya menghidupkan suasana proses belajar mengajar dikelas. Kemudian proses situasi tidak hanya mengarahkan persepsi guru, orang tua, komunitas, dan peserta didik terhadap kurikulum, tetapi juga kesadaran reflektif guru dalam mengkondisikan lingkungan belajar peserta didik. Skilbeck (1984) membagi situasi belajar ini menjadi dua bagian, pertama, perubahan-perubahan dan ekspektasi kultural dan sosial, termasuk ekspektasi orang tua, persyaratan kepegawaian, asumsi-asumsi komunitas, nilai-nilai, hubungan-hubungan yang berubah (misalnya antara orang dewasa dan anak-anak) dan ideology; dan kedua, masalah-masalah dan kekurangan yang dirasakan ada dalam kurikulum.

Pendidikan Islam dan Peranannya

Pendidikan Islam memiliki beberapa rumpun kalimat istilah dari bahasa arab, ada *at-tarbiyah*, *at-ta'lim*, *at-tadris*, *at-tadzhib* dan *at-ta'dib*. Istilah yang Pendidikan Islam menurut Naquib Al-Attas yang lebih tepat adalah *at-ta'dib* yang bermakna proses perwujudan manusia yang mempunyai adab, yang mana adab didefinisikan sebagai: (1) *The one who is sincerely conscious of his responsibilities towards and true God*, (2) *Who understands and fulfills his obligations to himself and others in his society with justice*, and (3) *who constantly strives to improve every aspect of himself towards perfections as a man of adab*.⁸ Secara kesimpulan menyeluruh pengertian *ta'dib* adalah menjadikan manusia

⁵Raihani, *Pendidikan Islam dalam Masyarakat Multikultural* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). 63

⁶Kelly dalam Raihani, *Ibid*, 71.

⁷Raihani, *Ibid*. 68.

⁸Al-attas dalam Raihani. *Ibid*, 22.

yang terus berusaha untuk mengembangkan kebaikan bagi dirinya sendiri, masyarakatnya secara adil dan bertanggungjawab terhadap aturan-aturan Tuhan.

Peran pendidikan sebagai agen perubahan adalah merubah orang yang kurang beradab menjadikan orang yang beradab atau beretika. Seorang ahli sosiologi Pierre Bourdieu mengatakan bahwa pendidikan adalah agen bagi reproduksi kultural.⁹ Artinya pendidikan berperan besar dalam memproduksi ulang dan terus menerus mendampingi kelas-kelas sosial yang ada di masyarakat. Di sekolah anak-anak yang datang dari keluarga yang memiliki kultur berbeda-beda dalam bentuk relasi/pergaulan sosial, bahasa dan tradisi, serta gaya hidup lainnya. Sehingga disinilah peran sekolah untuk membongkar jurang pemisah antar kelas-kelas sosial yang berbeda melalui implementasi nilai-nilai akhlak di sekolah.

Mengoptimalkan *Hidden Curriculum*

Pendidikan kita selama ini sesungguhnya tidak lebih dari upaya mentransfer ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) tentang ilmu agama kepada peserta didik daripada mendidik anak dalam arti yang luas. Hal ini bisa dilihat dari aktivitas belajar mengajar dikelas dimana guru lebih menekankan tercapainya materi yang diajar secara kuantitatif daripada menemukan nilai agama kepada anak sebagai kerangka spiritual dan pedoman moral sebagai bekal masa depan. Ditambah lagi dengan model evaluasi yang menekankan kemampuan hafalan peserta didik, misalnya bagi yang hafal sekian banyak doa, ayat atau hadits akan mencapai nilai tinggi, sedangkan mereka yang tidak hafal akan memperoleh nilai yang rendah. Walaupun telah menjalankan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari guru agama lebih menekankan pembahasan materi pelajaran yang tertulis pada buku ajar daripada mendiskusikan persoalan-persoalan kehidupan riil yang terjadi di masyarakat yang perlu pemikiran dan telaah kritis sehingga agama benar-benar berfungsi dan masuk dalam perilaku kehidupannya.

Pendidikan agama Islam lebih menekankan ranah kognitif peserta didik dan kurang menekankan ranah afektifnya, maka dari itu dalam membawa materi pendidikan Agama Islam perlu guru menyisipkan metodologi partisipatoris melalui *hidden curriculum*, bukan dengan metodologi indoktrinasi yang akhirnya melahirkan sikap dogmatis yang fanatic dan ekstrim. Maka hal tersebut perlu adanya pendekatan etis-filosofis dalam pendidikan agama. Pendekatan etis dibutuhkan untuk memahami nilai-nilai sakral (*transcendental*) dari diktum-diktum ilahiyah. Sedangkan pendekatan filosofis diorientasikan pada pengembangan daya kritis dan nalar dalam memahami pelajaran agama untuk membaca persoalan-persoalan yang tengah terjadi di masyarakat. Mudjia Rahardjo (2006) menambahkan pendidikan Islam selama ini belum dirumuskan secara jelas kerangka paradigm filosofis tentang pendidikan agama yang seharusnya dijadikan dasar pengembangan operasional pelaksanaan pendidikan agama.

Sebuah definisi kurikulum yang dianggap sesuai dengan hakikat dan tujuan pendidikan agama Islam adalah, *a set of experiences that the goals of their school* (satu set pengalaman yang dialami oleh peserta didik dibawah bimbingan sekolah untuk

⁹ Pierre Bourdieu dalam Raihani, *Ibid*, 24.

mencaai tujuan yang diinginkan).¹⁰ Definisi ini memberikan penjelasan tentang pengalaman yang tidak terbatas hanya pada ruang kelas tetapi mencakup ruang diluar kelas baik itu pengalaman peserta didik di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat. Kemudian pengalaman belajar yang aktif harus dilakukan oleh peserta didik yang dikontrol oleh pihak sekolah yang bekerjasama dengan pihak luar sekolah. Hal ini perlu diarahkan agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Misalnya melakukan monitoring terhadap suasana belajar peserta didik diluar sekolah melalui diskusi-diskusi ringan, sehingga peserta didik akan lebih terbuka dengan pengalaman-pengalaman yang dialaminya. Umpan balik yang diberikan guru secara tidak terstruktur ini merupakan bagian dari *hidden curriculum* yang sangat efektif terhadap perubahan-perubahan sosial peserta didik.

Peran *hidden curriculum* ini sangat vital karena dapat memberikan kontribusi dalam proposi yang lebih besar terhadap pengalaman belajar peserta didik dibandingkan kurikulum tertulis.¹¹ Peserta didik dapat dengan mudah meniru perilaku guru yang mereka saksikan selama disekolah. Ini memposisikan guru sebagai orang yang patut ditiru. Guru masih dianggap sebagai contoh “perilaku” yang sempurna. Karena itu para guru pendidikan Islam harus sadar akan pentingnya *hidden curriculum* yang berperan besar terhadap perkembangan afektif peserta didik. Sebagai guru agama yang berprofesi mengajarkan ilmu keagamaan Islam juga perlu menyeimbangkan bagaimana bersikap kepada peserta didik non muslim.

Reformasi sosial dalam pendidikan biasanya tidak secara eksplisit dimuat di dalam kurikulum atau bukan karena bentuk kurikulumnya, akan tetapi lebih karena *hidden curriculum* (kurikulum tersembunyi).¹² *Hidden curriculum* merupakan segala sesuatu yang diperoleh peserta didik dari proses pendidikan yang tidak tertulis dalam kurikulum formal. Dengan kata lain, *hidden curriculum* sebagai efek samping dari sebuah proses pendidikan yang dirancang dan juga bisa menjadi pendukung bagi kurikulum yang tertulis.¹³ *Hidden curriculum* tanpa disebutkan secara eksplisit di lingkungan sekolah sebenarnya keberadaannya sudah terwujud, seperti budaya sekolah piket membersihkan kelas, kegiatan sholat berjamaah, kegiatan peringatan hari besar Islam maupun hari besar nasional, menggunakan seragam yang telah ditentukan dan tertib atas aturan-aturan yang berlaku dalam sekolah tersebut.

Konflik atau intoleransi sosial yang diakibatkan oleh salah satu penafsiran terhadap ajaran agama itu sedikitnya ada dua bentuk¹⁴, *pertama*, konflik intra-agama atau yang lazim disebut konflik antar madzhab. Konflik semacam ini biasanya bermuara dari perbedaan pemahaman terhadap ajaran agama diantara sesama pemeluk agama, *kedua*, konflik antar agama atau disebut juga konflik antar ummat beragama. Konflik seperti ini karena skalanya bisa lebih luas dari yang pertama, maka faktor lainnya juga memiliki peran yang tidak kecil, misalnya faktor ekonomi, politik, mekanisme dakwah, sistem

¹⁰ Raihani, *Ibid*, 55.

¹¹ Hunkies dalam Raihani, *Ibid*, 74.

¹² Giroux & Purple dalam Raihani, *Ibid*, 39.

¹³ Raihani. *ibid*, 73.

¹⁴ Dadang Kahmad dalam Raihani, *Ibid*, 66.

pendidikan, struktur sosial dan sebagainya. Menurut Shahab dalam Zainuddin¹⁵, jika setiap penganut agama mempertahankan kebenaran sejati setiap agama, bukan *symbol*, maka tidak akan terjadi konflik.

Oleh sebab itu, dalam menghadapi situasai perbezaan dalam lingkungan sosial hendaknya yang digunakan sebagai patokan adalah perspektif filosofis bukan sosiologis tanpa terjebak pada simbol-simbol agama. Maka dari itu untuk menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan sosial perlu memperhatikan berbagai aspek, pertama, perlunya reorientasi pendidikan agama Islam yang berwawasan kerukunan ummat dan keramahan (*rahamatan lil 'alamiin*), kedua, upaya peningkatan kualitas pendidikan pada masing-masing ummat.¹⁶

SIMPULAN

Penyusunan ketentuan-ketentuan sekolah yang tercover sebagai *hidden curriculum* perlu diketengahkan agar tujuan-tujuan dalam mencapai sikap harmonis sosial menjadi budaya dan terbentuk sejak dini hingga anak tumbuh dewasa. *Hidden curriculum* ini erat kaitannya dengan nilai-nilai yang dipegang oleh guru maupun peserta didik. Penanaman pendidikan Islam sebenarnya tidak terbatas pada teori-teori yang harus dihafalkan peserta didik tapi lebih kepada makna pemahaman dan internalisasi nilai-nilai agama yang melahirkan akhlaq karimah. Disinilah peran guru agama yang harus dioptimalkan bagaimana upayanya agar peserta didik memiliki sikap toleransi dan rukun bersosial.

¹⁵ Zainuddin. "Pendidikan Agama Berwawasan Kerukunan", dalam Mudjia Rahardjo (ed). Quo vadis pendidikan Islam. (Malang: UIN Malang Perss), hal. 30, Ibid, 189.

¹⁶ Zainuddin. Ibid, 190.